



IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK (PSP) TAHUN 2021 DI SDN 23 MENYUMBUNG KABUPATEN SINTANG, KALIMANTAN BARAT

Jumardi Budiman^{*1}, Muhammad Irfan², Tira Maya Maisesa Malino³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Tanjungpura

Diterima: 9 April 2022 . Dipublikasi: 31 Oktober 2022.

Abstract. The purpose of this study is to describe the implementation of the “Program Sekolah Penggerak” (PSP) in 2021 at SDN 23 Menyumbang, Sintang Regency. The research method used is a qualitative study in the form of school ethnographic research. The subjects of this study were principals, teachers, students and representatives of parents of students at SDN 23 Menyumbang. Data collection techniques in the form of observation, interviews and document studies. Data collection tools in the form of observation guidelines, interview guidelines and supporting documents. Data analysis techniques are data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the study show that: 1) the leadership competence of principals has increased in terms of designing policy directions, managing human resources, designing school budgets and building partnerships with stakeholders after PSP intervention; 2) There is an adaptation to changes in teacher performance in the learning process, namely the teacher guides students more intensively in class and uses media so that students understand the material more easily; 3) Several internal factors that support the initial change in the implementation of PSP at SDN 23 Menyumbang, namely: the attitude, commitment and managerial competence of the principal, the teacher's performance and positive response to changes in education policy, parental support through the school committee, and school conditions that can relate to electricity and internet network. Meanwhile, external factors are the socio-economic-cultural conditions of the community, support from industry and local government and support for local government policies.

Keywords: implementation, *sekolah penggerak*, *kepala sekolah penggerak*.

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi Program Sekolah Penggerak (PSP) tahun 2021 di SDN 23 Menyumbang, Kabupaten Sintang. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif dengan bentuk penelitian etnografi sekolah. Subyek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, siswa dan perwakilan orang tua siswa SDN 23 Menyumbang. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi dokumen. Alat pengumpulan data berupa pedoman observasi, pedoman wawancara dan dokumen pendukung. Teknik analisa data yakni dengan reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kompetensi kepemimpinan kepala sekolah mengalami peningkatan dalam hal merancang arah kebijakan, mengelola SDM, merancang anggaran sekolah dan membangun kemitraan dengan para pemangku kepentingan setelah intervensi PSP; 2) Terjadi adaptasi perubahan kinerja guru dalam proses pembelajaran yakni guru membimbing siswa secara lebih intensif di kelas serta menggunakan media sehingga siswa lebih mudah memahami materi; 3) Beberapa faktor internal yang mendukung perubahan awal implementasi PSP di SDN 23 Menyumbang yakni: sikap, komitmen dan kompetensi manajerial kepala sekolah, kinerja dan respon positif guru terhadap perubahan kebijakan pendidikan, dukungan orang tua melalui komite sekolah, serta kondisi sekolah yang dapat berhubungan dengan listrik dan jaringan internet. Sedangkan faktor eksternal yakni kondisi socio-economic-cultural masyarakat, dukungan bantuan dari industri dan pemerintah lokal dan dukungan kebijakan pemerintah daerah.

Kata kunci: implementasi, Sekolah Penggerak, Kepala Sekolah Penggerak

Pendahuluan

Perluasan akses pendidikan kian diperkuat pada era Reformasi melalui amandemen UUD 1945, yakni dengan memastikan negara wajib memberikan layanan pendidikan dasar, memprioritaskan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Amanat UUD 1945 ini menjadi landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang secara khusus mengatur perihal wajib belajar 9 tahun, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), desentralisasi kewenangan pendidikan kepada pemerintah daerah, serta manajemen berbasis sekolah (Naskah Akademik Program Sekolah Penggerak, 2020).

Pada kurun tahun 2015—2019, pemerintah berhasil menurunkan Angka Putus Sekolah (APTS) di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, bahkan APTS SMA telah turun sebesar 72% dari 7,01% pada tahun 2015 menjadi 1,97% pada 2019. Capaian penurunan APTS yang signifikan di jenjang sekolah menengah merupakan hasil dari salah satu program prioritas

nasional, yaitu Program Indonesia Pintar (PIP). Bantuan PIP disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar dengan cara memberikan bantuan tunai pendidikan kepada siswa SD, SMP SMA, dan SMK dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai Pendidikan (Renstra Kemendikbud 2020—2024).

Turunnya angka putus sekolah berkontribusi pada meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SMP dan SMA Sederajat. APK SMP/MTs Sederajat meningkat dari 88,6% pada tahun 2014 menjadi 90,6% pada 2019. Sedangkan, APK SMA/SMK/MA Sederajat meningkat dari 74,3% pada tahun 2014 menjadi 83,98% pada 2019. Dalam kurun waktu yang sama, rata-rata lama sekolah juga meningkat seiring perkembangan APK tersebut. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 (lima belas) tahun ke atas saat ini mencapai 8,75 (Renstra Kemendikbud 2020—2024).

Sebagai upaya melanjutkan dan mengembangkan kebijakan peningkatan mutu pendidikan agar lebih merata kepada lebih banyak sekolah dan daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

*surel korespondensi: jumardib@fkip.untan.ac.id

menginisiasi Program Sekolah Penggerak (PSP). Program ini berupaya mendorong sekolah-sekolah melakukan transformasi diri untuk meningkatkan mutu pembelajaran di tingkat internal, kemudian melakukan pengimbasan ke sekolah-sekolah lain untuk melakukan peningkatan mutu serupa. Agar program ini berkelanjutan, maka perlu upaya untuk menciptakan ekosistem peningkatan mutu pendidikan baik di tingkat nasional, daerah dan satuan pendidikan. Regulasi, kebijakan, dan penganggaran bidang pendidikan akan difokuskan untuk mendukung peningkatan mutu agar capaian hasil belajar meningkat secara terus menerus baik di level satuan pendidikan, daerah, hingga nasional (Naskah Akademik Program Sekolah Penggerak, 2020).

Transformasi di sekolah harus menggabungkan dua jalur sekaligus, yaitu meningkatkan momentum yang mendorong perubahan sekaligus meminimalkan hambatan yang mungkin timbul dalam proses transisi. Perspektif manajemen perubahan ini telah diadopsi dalam program keterlibatan semua warga sekolah melalui kerangka diskusi yang

apresiatif sehingga mampu memotivasi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dan siswa untuk menggali potensi mereka (Hastowo & Abduh, 2021; Santika, 2017). Proses dialog dalam perspektif perubahan melalui mekanisme sekolah penggerak juga untuk meminimalkan munculnya resistensi yang dapat menghambat proses transformasi (Mulyadi & Wikanengsih, 2022; Patilima, 2021; Satriawan et al., 2021; Wijaya et al., 2020).

Proses pembelajaran akan berkualitas tinggi jika kepala sekolah selalu berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan pengembangan profesional guru dan bersedia membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran siswa, menunjukkan kedewasaan siswa secara mental, moral dan emosional untuk berperilaku, profesionalisme, serta nilai-nilai pengajaran yang sesuai dengan kode etik yang berlaku (Mariana, 2021; Rahayuningsih & Rijanto, 2022; Ritonga et al., 2022; Sudarmanto, 2021; Wibawani et al., 2019).

Pencapaian profil pelajar Pancasila melalui mekanisme sekolah penggerak dapat meningkatkan

motivasi belajar siswa, karena siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki (Agustina, 2019; Sherly et al., 2021).

Pada tahun 2021, Kemendikbudristek berhasil melahirkan 2.500 sekolah penggerak angkatan pertama di 34 provinsi yang meliputi 111 kabupaten/kota. Salah satu sekolah di Kalimantan Barat yang berkesempatan untuk mengikuti program ini adalah SDN 23 Menyumbang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 6555/C/HK.00/2021. SDN 23 Menyumbang didirikan tahun 1982 seiring dengan bertambahnya penduduk di Kelurahan Ulak Jaya dan Kelurahan Menyumbang Tengah, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Selain terpilih sebagai Sekolah Penggerak, sejak tahun 2013, SDN 23 Menyumbang pernah menjadi sekolah percontohan yang unggul serta sekolah inklusif yang mengakomodir siswa dengan kebutuhan khusus. Hal ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat

dalam akses pendidikan yang lebih berkualitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi PSP di SDN 23 Menyumbang selama tahun 2021 yang mencakup adaptasi dan transformasi yang terjadi sebagai dampak intervensi PSP.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif dengan bentuk penelitian etnografi sekolah. Subyek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, siswa dan perwakilan orang tua siswa SDN 23 Menyumbang. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi dokumen. Alat pengumpulan data berupa pedoman observasi, pedoman wawancara dan dokumen pendukung. Teknik alisa data yakni dengan reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Keterlibatan dalam PSP

Proses adaptasi perubahan kepemimpinan dan keterlibatan kepala SDN 23 Menyumbang dalam implementasi PSP, dimulai dengan

merumuskan visi dan merancang arah (*Setting Direction*) perubahan yang terjadi. Setelah mengikuti pelatihan kepala sekolah penggerak, visi dan misi SDN 23 Menyumbang berubah. Visi yang semula hanya berfokus pada nilai religius dan penguasaan IPTEK, kini semakin diperkuat dengan kesadaran digital teknologi, nilai-nilai budaya, peningkatan karakter dan kewirausahaan. Melalui rapat pembahasan yang melibatkan kepala sekolah, dewan guru dan staf tata usaha, visi dan misi yang baru menjadi “terdepan dalam imtaq dan iptek, mengembangkan seluruh potensi peserta didik dengan dijiwai oleh nilai-nilai budaya, karakter bangsa dan kewirausahaan”. Secara umum, perubahan ini menyesuaikan tujuan PSP yakni membentuk profil pelajar pancasila.

Dalam merancang arah, adaptasi yang dilakukan kepala sekolah meliputi rencana peningkatan kapasitas guru, peningkatan kualitas proses pembelajaran di kelas, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dengan tambahan Biaya Operasional Sekolah (BOS) Kinerja

dan peningkatan fasilitas digitalisasi sekolah.

Pertama, dalam merancang pengelolaan SDM, kepala sekolah menyusun program pelatihan untuk mempercepat adaptasi guru-guru dalam mengimplementasikan PSP. Bentuk Peningkatan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) yang dilakukan antara lain dengan mengadakan pelatihan penilaian diagnostik bagi siswa dan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sekolah penggerak dan pemanfaatan informasi teknologi (IT) secara rutin setiap dua kali dalam seminggu. Kepala sekolah juga menginstruksikan setiap guru untuk mengikuti Kelompok Kerja Guru (KKG) agar memperoleh berbagai informasi terbaru terkait kebijakan pendidikan, menambah wawasan tentang pengelolaan kelas dan saling memberikan solusi untuk menyelesaikan persoalan atau kendala yang ditemui saat pembelajaran.

Kedua, kepala sekolah merancang peningkatan kualitas pembelajaran melalui supervisi langsung kepada setiap guru. Supervisi yang dilakukan berupa pemeriksaan kelengkapan perangkat

ajar meliputi Program Tahunan (Prota), Program Semester (Prosem), Silabus dan RPP serta melakukan observasi kelas untuk menilai pelaksanaan kesesuaian kegiatan pembelajaran dengan rencana yang disusun guru.

Ketiga, kepala sekolah dan dewan guru menyusun RAPBS dari pendanaan BOS Kinerja. Berdasarkan hasil rapat, alokasi BOS Kinerja untuk pembelian fasilitas digital dan pelatihan bagi guru. Keempat, dengan melakukan penambahan dan peningkatan fasilitas digitalisasi sekolah yaitu penyediaan laptop dan printer khusus untuk keperluan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), menambah *bandwidth internet* dan menambah perangkat *router* agar seluruh warga sekolah dapat mengakses konten pembelajaran.

Pada aspek pengelolaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan Program Sekolah Penggerak, beberapa kebijakan yang dilakukan kepala sekolah berupa: Pertama, kepala sekolah memberikan tugas tambahan kepada beberapa guru yang dianggap kompeten dan bertanggung jawab untuk membantu mengelola keuangan sekolah dengan tambahan BOS

Kinerja, membimbing kegiatan ekstrakurikuler siswa sebagai wadah pencapaian profil pelajar pancasila, mewakili kepala sekolah pada beberapa kegiatan eksternal serta sementara menggantikan posisi, tugas dan kewenangan jika kepala sekolah berhalangan hadir di sekolah.

Kedua, pelatihan internal dilaksanakan secara efektif pada bulan Oktober 2021 dengan agenda pelatihan penyusunan RPP, *Assesment* dan modul proyek pelajar Pancasila setiap hari kamis dan pelatihan informasi teknologi untuk media pembelajaran dan penggunaan aplikasi data setiap hari sabtu.

Adaptasi juga dilakukan kepala sekolah dengan memberikan penghargaan dan sanksi kepada guru dan staf akademik berdasarkan hasil penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi guru PNS dan penilaian kinerja kepada pegawai honorer. Rencana SKP disusun oleh guru setiap Januari, dinilai pada Desember di tahun yang sama. Guru yang memenuhi indikator SKP akan diberikan penghargaan berupa nilai rata-rata yang tinggi, sedangkan bagi yang kurang, akan diberikan sanksi berupa teguran lisan dan pembinaan.

SKP menjadi syarat bagi guru ASN untuk mendapatkan tunjangan fungsional. Bagi guru dan pegawai honorer, penghargaan yang diberikan berupa insentif tambahan.

Proses implementasi PSP yang dilaksanakan kepala SDN 23 Menyumbang berikutnya yakni membangun Kemitraan (*Building Collaboration*). Upaya dalam membangun kemitraan dilakukan melalui kemitraan dengan orang tua, komite sekolah dan pemerintah lokal. Upaya membangun kemitraan sekolah dengan orangtua dilakukan dengan dua cara. Pertama, adanya *WhatsApps Group* (WAG) berdasarkan kelas. WAG ini dimanfaatkan untuk perizinan siswa tidak hadir, pemberitahuan PR, dan sarana untuk menyampaikan pengumuman/ sosialisasi terkait kebijakan sekolah (misalnya keputusan mendadak untuk mengalihkan pembelajaran di rumah

Kedua, kunjungan langsung guru kelas ke rumah siswa absen atau jarang mengerjakan PR sehingga guru dapat berinteraksi langsung dengan orang tua dan memberikan motivasi kepada siswa.

“jika ada siswa yang jarang masuk atau tidak semangat sekolah

maka akan kami datangi satu persatu ke kediamannya masing-masing” (wawancara dengan Ibu Dm, 15 September 2021)

Pola kemitraan dengan orang tua sudah dibangun oleh kepala sekolah sejak kebijakan belajar dari rumah (BDR) selama masa pandemi COVID-19 hingga Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Pola kemitraan tetap dipertahankan karena dianggap relevan dengan implementasi PSP di SDN 23 Menyumbang.

Bentuk kemitraan dengan komite sekolah berupa rapat tiap semester. Pasca intervensi PSP, kepala sekolah A melakukan pemilihan ketua komite sekolah yang sempat kosong beberapa bulan karena ketua sebelumnya meninggal dunia. Saat ini, ketua Dewan Komite SDN 23 Menyumbang adalah orang tua siswa kelas VI yang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Hukum. Selain karena tingkat pendidikan, ketua komite dipilih karena dianggap mampu mendukung kebijakan kepala sekolah terkait implementasi PSP, terutama dalam membangun kemitraan sekolah dengan orang tua serta peningkatan keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran siswa.

Pendekatan kepada pemerintah lokal dengan mengajukan proposal permohonan prioritas instalasi saluran air bersih kepada PDAM dan kelurahan Ulak Jaya dan mengadakan kegiatan vaksinasi siswa, sosialisasi kesehatan serta penggunaan area parkir sekolah sebagai posko kesehatan saat banjir melanda dengan Puskesmas Dara Juanti.

Bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap tiga pihak tersebut mencerminkan bahwa konsep dan tujuan PSP yakni menciptakan iklim kolaborasi bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan sudah mulai diwujudkan.

Berdasarkan proses observasi, wawancara dan interaksi selama dua bulan dengan warga sekolah, konsep PSP yang dimaknai oleh kepala sekolah yakni 'pengembangan karakter siswa', 'digitalisasi' dan 'penyederhanaan' proses pembelajaran. Menurut Kepala sekolah, bahwa PSP memprioritaskan pada pembentukan karakter siswa.

Kurikulum prototipe dalam PSP juga dianggap lebih mudah diimplementasikan dan dipahami oleh guru maupun siswa karena materi

disampaikan secara parsial bukan tematik sehingga guru hanya mengajarkan materi berdasarkan disiplin ilmu (mata pelajaran).

Namun demikian, kepala sekolah menyadari bahwa implementasi PSP sangat tergantung dari kinerja kepala sekolah sebagai motor penggerak seluruh warga sekolah. Oleh karena itu, dalam proses adaptasi PSP, perannya harus mampu mengambil kebijakan secara cepat dan tepat.

Kinerja Guru dan Keterlibatan dalam PSP

Setelah mengikuti pelatihan secara daring pada 24 Mei - 4 Juni 2021, lima guru di SDN 23 Menyumbang mulai memahami konteks PSP. Kelima guru tersebut diwajibkan melakukan pengimbasan pengetahuan kepada seluruh guru lainnya melalui program *In house Training* (IHT). Kinerja guru dan keterlibatan mereka dalam PSP akan dilihat dari sisi etos kerja, proses pembelajaran dan sosial dan profesional guru.

Pada aspek etos Kerja, tingkat kedisiplinan dan kehadiran guru yang baik dibuktikan dengan presensi kehadiran dan kepulangan guru yang tepat waktu. Berdasarkan pengamatan

di lapangan, guru selalu hadir meskipun tidak ada jadwal mengajar. Hal ini dikarenakan mereka memiliki urusan administratif dan tugas tambahan yang diberikan kepala sekolah.

Mereka juga menyikapi dinamika perubahan paradigma, terutama guru-guru yang berusia diatas 50 tahun, untuk mengikuti peningkatan keprofesian berkelanjutan terkait keterampilan IT; masuk dalam Kelompok Kerja Guru (KKG) Kabupaten berdasarkan tingkat kelas yang diajar; mengikuti pelatihan terkait dengan PSP yang diisi oleh Instruktur Nasional dan pengimbasan oleh rekan sejawat dalam rangka PSP.

Guru di SDN 23 Menyumbang juga mengenal pengabdian tanpa batas. Berdasarkan hasil wawancara, guru di SDN 23 Menyumbang mencintai profesi mereka yang mulia sehingga selalu mengerahkan segala kemampuan untuk tetap fokus mengajar dan mendidik siswa di sekolah. Selain membimbing siswa agar mahir dalam membaca, menulis dan berhitung, guru juga selalu memberikan motivasi untuk selalu belajar. Hal ini dibuktikan dengan kesediaan guru berkunjung kerumah

siswa untuk mengingatkan agar lebih rajin belajar dan tidak bermalas-malasan.

Terdapat tiga intervensi yang diberikan kepada guru dalam pelatihan PSP, yaitu pengenalan kurikulum yang disederhanakan dengan prinsip *differentiated learning* dan *teaching at the right level*, pelatihan pedagogi dan penilaian, serta pelatihan pemanfaatan aplikasi digital guru. Hanya satu intervensi yang baru dijalankan yaitu pengenalan terhadap pemanfaatan aplikasi digital untuk guru, seperti aplikasi merdeka mengajar yang merupakan aplikasi penunjang bagi guru sekolah penggerak untuk membuat asesmen, merekam segala aktivitas guru mulai dari melakukan perencanaan, pembelajaran, dan penilaian berdasarkan perangkat.

Para guru sudah mulai mengunduh aplikasi merdeka mengajar dengan pin khusus yang diaktifkan oleh operator kabupaten untuk login. Selain itu ada aplikasi rumah belajar Kemendikbud untuk mencari bahan penunjang proses pembelajaran. Namun sayangnya guru belum mulai menggunakan aplikasi ini secara maksimal, perlu pelatihan

lanjutan agar para guru bisa menggunakannya.

Adaptasi dalam Proses pembelajaran

Proses pembelajaran di SDN 23 Menyumbang pada saat ini sedang dalam masa transisi dari K-13 ke PSP. Proses adaptasi ini diberlakukan pada kelas 1 dan 4 melalui beberapa tahap, yaitu:

Pertama, guru mulai belajar menyusun RPP PSP meskipun belum berdasarkan data asesmen diagnostik. Penyusunan RPP belum disusun berdasarkan kebutuhan, keadaan, dan latar belakang masing-masing siswa, yang seharusnya menjadi proses penting dalam PSP. Guru masih menyalin RPP yang dibuat oleh Ibu H (Guru Agama Islam) yang ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai *role model* (contoh) bagi guru yang lainnya. RPP masih dianggap sebagai persyaratan administratif semata agar nampak seakan PSP sudah berjalan di sekolah tersebut, padahal penyusunannya belum sesuai dengan proses dan aturan yang berlaku. Saat ini, para guru masih menggunakan RPP K-13 sebagai perangkat utama pembelajaran.

Kedua, guru melakukan uji coba penggunaan buku PSP di kelas, meski masih dalam masa transisi pembelajaran daring ke luring dan dari K-13 ke PSP. Penggunaan buku PSP dianggap lebih mudah untuk diimplementasikan di kelas karena tidak lagi bersifat tematik dan langsung fokus ke mata pelajaran.

Ketiga, guru mulai berlatih melakukan asesmen kepada siswa dengan menyesuaikan keadaan siswa. Sebagai contoh, guru mencoba “menurunkan standar” kompetensi pembelajaran di kelas 4 yang seharusnya membahas materi perkalian angka ribuan menjadi perkalian angka ratusan. Meskipun asesmen yang dilakukan oleh guru belum memenuhi standar asesmen diagnostik, pemahaman guru untuk peka terhadap kebutuhan masing-masing siswa.

Keempat, guru mulai menggunakan media ajar yang memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran. Contohnya, guru menggunakan gambar yang dicetak lalu ditempelkan di papan tulis dan menggunakan proyektor.

Meskipun beberapa guru cenderung masih mengajar dengan

cara ceramah, tanya jawab dan demonstrasi. Namun mereka sudah mulai melibatkan siswa secara aktif untuk mencari materi, mengajukan diri untuk menyelesaikan soal, dan menyimpulkan pelajaran. Interaksi yang terjadi dengan peserta didik bersifat mengarahkan dan membangun budaya ketakwaan (berdoa saat memulai dan mengakhiri pembelajaran), serta etika (meminta izin pada guru). Pada akhir pertemuan tatap muka, guru melakukan evaluasi dengan meminta siswa mengisi soal, pertanyaan lisan, mengerjakan soal di papan tulis dan pemberian PR. Bentuk evaluasi ini sudah sesuai dengan PSP, karena evaluasi yang dilakukan tidak harus berupa ujian tertulis.

Berdasarkan paparan di atas, proses pembelajaran masih pada tahap adaptasi implementasi PSP yang belum sempurna. Sejauh ini belum tampak proses transformasi metode mengajar guru dalam meningkatkan capaian hasil belajar siswa secara holistik, baik dari segi kompetensi kognitif maupun non kognitif (karakter) dalam rangka mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.

Respon Guru terhadap PSP

Guru menganggap dalam menjalankan kurikulum PSP, dari sisi waktu lebih cepat dan dari sisi evaluasi nampak lebih sederhana. Dalam sisi penyampaian materi, PSP nampak lebih ringan karena hanya menyampaikan satu disiplin ilmu saling dengan mencari keterkaitannya dengan disiplin ilmu lain. Para guru juga menilai bahwa kurikulum prototipe dalam PSP lebih mudah dipahami dan diimplementasikan daripada K13, karena kembali lagi ke per-mata pelajaran dan tidak lagi menggunakan pendekatan tematik yang lebih rumit.

Pada akhirnya para guru SDN 23 Menyumbang lebih memilih untuk mengajar dengan menggunakan buku teks pelajaran PSP, walaupun RPP masih menggunakan K13. Selain itu para guru juga menilai bahwa PSP ini mirip dengan cara belajar siswa aktif (CBSA) yang pernah diterapkan di masa lalu. Para guru di SDN 23 Menyumbang berharap agar PSP ini tidak dengan cepat berganti seiring pergantian menteri pendidikan.

Proses dan Hasil belajar Siswa

Kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di SDN 23 Menyumbang

dimulai sejak 1 September 2021 berdasarkan arahan Surat Edaran Bupati Sintang Nomor 420/2976/DISDIKBUD-A2/2021 tanggal 30 Agustus 2021. Keputusan ini mendapat respon positif dari guru, orang tua dan siswa yang telah lama merindukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Namun demikian PTM harus dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan yakni pembatasan 50% jumlah siswa dalam satu kelas dan waktu pertemuan tatap muka 120 menit per hari per siswa.

Oleh karena itu, pada tahun ajaran baru ini, terjadi dua proses transisi di SDN 23 Menyumbang yakni transisi mode pembelajaran daring ke PTM dan transisi K-13 ke kurikulum sekolah penggerak. Proses transisi dan adaptasi siswa ini akan ditinjau dari elemen proses belajar, hasil belajar dan peran orang tua dalam aktivitas belajar siswa.

Pembelajaran di kelas yang hanya berlangsung 120 menit, membuat siswa tidak mendapatkan pengalaman belajar yang menyeluruh. Oleh karena itu, beberapa guru memberikan tugas sebagai bahan siswa untuk pembelajaran di rumah yang dikomunikasikan dengan orang

tua melalui WAG. Optimalisasi *smartphone* sebagai media belajar sudah dilakukan sejak kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR) masa Pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu sehingga siswa terbiasa memanfaatkan perangkat tersebut untuk mencari materi atau mengerjakan tugas. Berdasarkan paparan di atas, proses belajar siswa pasca intervensi PSP baru menunjukkan perubahan kecil yang positif seperti siswa sudah mau mengerjakan soal di depan kelas karena cara penyampaian materi oleh guru lebih mudah dimengerti serta sikap guru yang lebih intensif saat membimbing siswa. Namun pada aspek kedisiplinan mengerjakan PR dan ketepatan waktu hadir di sekolah, belum menunjukkan perubahan.

Adapun hasil belajar siswa SDN 23 Menyumbang yang dikaitkan sebagai dampak intervensi PSP hingga kini belum dapat terdeteksi. Ada dua faktor hal ini terjadi. Pertama, implementasi PSP di SDN 23 Menyumbang baru dimulai pada bulan Juli 2021, namun implementasi sebatas adaptasi yang dilakukan kepala sekolah dan guru. Proses pembelajaran dengan menggunakan

buku PSP dimulai pada September 2021 dengan RPP K-13 sebagai pedoman guru. Kedua, saat Ujian Tengah Semester pada akhir September 2021, guru masih menyusun soal dengan berlandaskan pada K-13 sehingga hasil UTS siswa menjadi tolak ukur pembelajaran K-13.

Hasil observasi di kelas selama penggunaan buku PSP, kesenjangan antara siswa yang mampu menguasai materi dengan yang belum mampu terlihat jelas saat mereka belajar di kelas. Siswa yang mampu menguasai materi dapat dengan mudah mengerjakan tugas yang diberikan guru saat di kelas. Kondisi ini disebabkan proses BDR selama 3 semester yang tidak efektif akibat ketidakmampuan orang tua membimbing siswa saat belajar di rumah.

Peran Orangtua

Peran orang tua dalam proses dan hasil belajar dipengaruhi oleh tiga hal, pertama tingkat ekonomi, kedua tingkat pendidikan, ketiga pola pikir dan dukungan orang tua terhadap proses pendidikan. Pertama, kondisi ekonomi orang tua yang umumnya

bekerja pada sektor informal menjadi kendala untuk memenuhi fasilitas dan kelengkapan belajar siswa. Beberapa orang tua tidak menyediakan fasilitas belajar di rumah seperti meja dan ruang khusus untuk belajar, mereka hanya mampu menyediakan pakaian seragam putih-merah dan seragam pramuka, tas dan alat tulis. Beberapa siswa bahkan tidak memakai sepatu ke sekolah karena orang tua belum mampu menyediakan.

Kedua, tingkat pendidikan orang tua yang umumnya hanya tamat SD – SMP, membuat orang tua kesulitan memahami materi sebagai bekal untuk membimbing siswa mengerjakan belajar di rumah. Sedangkan orang tua yang tamat SMA cenderung lebih mampu membantu siswa menyelesaikan tugas-tugas mereka. Ketiga, pola pikir dan dukungan orang tua dalam proses belajar. Beberapa orang tua memiliki kesadaran terhadap pentingnya pendidikan bagi anak sehingga mereka senantiasa mendampingi dan membimbing siswa dalam proses belajar, meskipun tingkat pendidikan dan ekonomi mereka rendah.

Faktor-faktor yang berpengaruh

Berdasarkan hasil temuan data pada profil, kepemimpinan kepala sekolah, kinerja guru dan proses belajar diatas, maka didapatkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap proses dan hasil perubahan dari intervensi PSP pada SDN 23 Menyumbang, Sintang , yaitu faktor internal dan eksternal.

Beberapa faktor internal yang berkontribusi yakni; Pertama, Pola Komunikasi Orang tua dan sekolah. Semenjak kebijakan kombinasi belajar dari rumah (BDR) dan pembelajaran tatap muka diberlakukan, orang tua memiliki peran kunci sebagai pembimbing bagi siswa. Hal ini dilihat dari beralihnya pola hubungan koordinasi melalui media WAG setiap kelas. Grup *Whatsapp* berfungsi untuk mengirimkan penugasan, menyampaikan pengumuman penting, sarana untuk saling berbagi informasi antara sesama orangtua siswa, ruang keluh kesah dan tanya jawab terkait dengan kebijakan sekolah maupun proses pembelajaran. Dengan adanya WAG di setiap kelas membuat jalur komunikasi antara sekolah dengan orangtua menjadi lebih efektif dan efisien.

Kedua, kemampuan manajerial serta komitmen kepala sekolah yang tinggi terhadap PSP dibuktikan dengan terpenuhinya berbagai persyaratan dan kegiatan yang mengarah pada capaian tujuan PSP. Selain itu kemampuan *budgeting* kepala sekolah dalam mengelola dana BOS (baik BOS Reguler maupun BOS Kinerja) juga menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan. Namun sayangnya pembinaan dari pengawas belum terjadi secara maksimal karena rasio pengawas dengan jumlah sekolah yang dibina tidak merata. Hal ini menyebabkan sekolah-sekolah yang ada di Sintang tidak mendapatkan pembinaan yang maksimal.

Ketiga, reputasi sekolah yang baik membuat dinas pendidikan kabupaten Sintang sering melibatkan SDN 23 Menyumbang untuk menjalankan berbagai macam program di bidang pendidikan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini dikarenakan kondisi SD dianggap siap dan mampu untuk menjalankan beberapa program tersebut. Guru dan tenaga kependidikan menjadi terbiasa beradaptasi dengan berbagai program

yang masuk silih berganti dan juga membangun citra sekolah ini sebagai “sekolah unggulan”.

Keempat, lokasinya sekolah yang strategis yaitu kemudahan akses internet dan ketersediaan listrik untuk menunjang digitalisasi sekolah. Hal ini menjadi salah satu daya tarik utama bagi orangtua untuk menyekolahkan anaknya disini. Faktor ini juga yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah siswa di SDN 23 ini dari tahun ke tahun yang berpengaruh pada peningkatan nominal BOS reguler yang diterima.

Kelima, tingkat pendidikan guru yakni strata 1 dan komitmen guru untuk menyesuaikan diri terhadap dinamika perubahan zaman dan kebijakan meskipun rata-rata usia guru di atas 50 tahun. Keenam, dukungan dari ketua komite sekolah dalam berbagai kebijakan dan perubahan yang dibuat oleh kepala sekolah, meskipun ketua komite baru saja terpilih sehingga masih beradaptasi terlebih dahulu agar bisa berkontribusi secara maksimal.

Adapun beberapa faktor eksternal yang berkontribusi antara lain; Pertama, kondisi sosio-ekonomi-kultural masyarakat dengan tingkat

pendidikan menengah ke bawah sehingga sangat menggantungkan proses pendidikan anaknya kepada guru di sekolah. Hal ini membuat orang tua selalu mendukung perubahan kebijakan sekolah selama perubahan tersebut berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran.

Kedua, dukungan bantuan dari industri dan pemerintah lokal seperti bantuan Bus sekolah sebagai sarana antar-jemput siswa dan pemberian beasiswa oleh PT SAM. Ketiga, kerjasama yang terjalin dengan baik antara sesama kepala sekolah penggerak se-Kabupaten Sintang dalam menyelesaikan masalah/kendala yang ditemui selama implementasi PSP juga berdampak pada percepatan adaptasi implementasi PSP di SDN 23 Menyumbang.

Keempat, koordinasi dalam jejaring *Program Management Office* (PMO) antara Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, DPRD Kabupaten Sintang, UPT Provinsi Kalimantan Barat (BP PAUD dan LPMP), diantaranya Dinas, LPMP, BP PAUD, Pusat pengembangan potensi profesi tenaga kependidikan (PEMPATEKA), Komite Pembelajaran

(kepala sekolah, guru dan pengawas), Perwakilan Orang Tua, perwakilan OSIS (untuk SMP dan SMA), dan perwakilan masyarakat, pendamping PSP, dan PMO. Kelima, dukungan kebijakan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang yaitu melalui komitmen untuk tidak melakukan mutasi kepala sekolah penggerak selama empat tahun mendatang demi menjaga keberlanjutan implementasi PSP dan harapan dana operasional sekolah penggerak yang belum direalisasikan akibat refocusing APBD.

Simpulan

Perubahan awal (*early changes*) dan proses adaptasi yang nampak setelah intervensi PSP di tingkat Satuan Pendidikan diantaranya adalah: 1) Kompetensi kepemimpinan kepala sekolah mengalami peningkatan dalam hal merancang arah kebijakan, mengelola SDM, merancang anggaran sekolah dan membangun kemitraan dengan para pemangku kepentingan setelah intervensi PSP; 2) Terjadi adaptasi perubahan kinerja guru melalui proses pembelajaran, guru

membimbing siswa secara lebih intensif di kelas serta menggunakan media sehingga siswa lebih mudah memahami materi; 3) Adaptasi awal yang terjadi dalam proses pembelajaran yakni Penggunaan buku PSP di kelas dengan durasi pembelajaran menyesuaikan aturan PTM terbatas yakni 120 menit; 4) Beberapa faktor internal yang mendukung perubahan awal implementasi PSP di SDN 23 Menyumbang yakni: sikap, komitmen dan kompetensi manajerial kepala sekolah, kinerja dan respon positif guru terhadap perubahan kebijakan pendidikan, dukungan orang tua melalui komite sekolah, serta kondisi sekolah yang dapat berhubungan dengan listrik dan jaringan internet. Sedangkan faktor eksternal yakni kondisi socio-economic-cultural masyarakat, dukungan bantuan dari industri dan pemerintah lokal dan dukungan kebijakan pemerintah daerah.

Ucapan Terima Kasih

Tim penulis menyampaikan terima kasih kepada Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen

Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang mendanai kegiatan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Agustina, N. E. (2019). Implementasi Program Sekolah Berbasis Ramah Anak untuk Memperkuat Nilai Panca Karakter Siswa. *Ilmu Pendidikan Jurnal Kajian Teori Dan Praktik Kependidikan*, 4(2), 79–92.
<https://doi.org/10.17977/um027v4i22019p079>
- Hastowo, A. T., & Abduh, M. (2021). Analisis Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah Dalam Implementasi Pembelajaran Daring. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 11(3).
- Mariana, D. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Efektivitas Sekolah Penggerak dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3).
<https://blog.kejarcita.id/tentang-program-sekolah-penggerak>
- Mulyadi, Y., & Wikanengsih, W. (2022). Implementasi Keterampilan Berbahasa Memirsa Dalam Capaian Pembelajaran Kurikulum Prototipe Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas X Pada Program Sekolah Penggerak. *Semantik*, 11(1), 47.
<https://doi.org/10.22460/semantik.v11i1.p47-60>
- Patilima, S. (2021). Sekolah Penggerak Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan. "Merdeka Belajar Dalam Menyambut Era Masyarakat 5.0."
- Rahayuningsih, S., & Rijanto, A. (2022). Upaya Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Pembelajaran pada Program Sekolah Penggerak di Nganjuk. *JAMU: Jurnal Abdi Masyarakat UMUS*, 2(02), 120–126.
- Ritonga, R., Hamid, A., Maulana Harahap, A., & Harahap, R. (2022). Penguatan Kompetensi Sosial-Emosional Bagi Kepala Sekolah Penggerak Melalui Kegiatan Lokakarya. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(1).
- Santika, I. G. N. (2017). Kepala Sekolah Dalam Konsep Kepemimpinan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya*, 7(1).
- Satriawan, W., Santika, I. D., & Naim, A. (2021). Guru Penggerak Dan Transformasi Sekolah Dalam Kerangka Inkuiri Apresiatif. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 11(1).
<https://doi.org/10.24042/alidarah.v11i1.7633>
- Sherly, Herman, Halim, F., Dharma, E., Purba, R., Sinaga, Y. K., & Tannuary, A. (2021). Sosialisasi Implementasi Program Profil Pelajar Pancasila Di Smp Swasta Sultan Agung Pematangsiantar. *JUBAEDAH: Jurnal Pengabdian Dan Edukasi Sekolah*, 1(3).
<https://doi.org/10.46306/jub.v1i3>
- Sudarmanto. (2021). Pengaruh Komunikasi Kepala Sekolah Terhadap Keterlaksanaan Kepemimpinan Sekolah Pada Program Sekolah Penggerak.

Jurnal Ilmiah Pro Guru, 7(4),
462-472.

- Wibawani, D. T., Wiyono, B. B., & Benty, D. D. N. (2019). Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin Perubahan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *JAMP: Jurnal Adminitrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 2(4), 181-187. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jamp/>
- Wijaya, A., Mustofa, Moh. S., Husain, F., Ramadhani, S., & Khomsa, F. N. (2020). Sosialisasi Program Merdeka Belajar dan Guru Penggerak Bagi Guru SMPN 2 Kabupaten Maros. *Jurnal Puruhita*, 2(1).
- Naskah Akademik Program Sekolah Penggerak, Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (2020).